

**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS**

SKRIPSI



NAMA : WENDI ARIANSYAH
NIM : 222015123

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**NAMA : WENDI ARIANSYAH
NIM : 222015123**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance*
Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Musi Rawas
Nama : Wendi Ariansyan
NIM : 22 2015 123
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing 1



Drs. Sunardi, SE., M.Si
NIDN/NBM : 020604630/784021

Pembimbing 2



Darmayanti, SE., Ak., MM., CA
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wendi Ariansyah

NIM : 222015123

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



ABSTRAK

Wendi Ariansyah/222015123/2019/Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan sampel, sampel yang digunakan sebanyak 34 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Kata Kunci : prinsip-prinsip *good governance*, kinerja.

Abstract

Wendi Ariansyah/ 222015123/2019/ The Influence of the Good Governance Principles on Local Governments Performance in the Regional Tax and Retribution Management Agency of Kabupaten Musi Rawas/ Public Sector Accounting.

The problem of this study was how the influence of good governance principles on local governments performance. The objective of this study was to measure the influence of good governance principles on local governments performance in the Regional Tax and Retribution Management Agency of Kabupaten Musi Rawas. This research was an associative study. The data used in this study was primary data. This study used a sample; the sample used was 34 respondents. Analyses of the data used in this study were qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicated that the good governance principles significantly had a positive influence on the local government performance in the Regional Tax and Retribution Management Agency of Kabupaten Musi Rawas

Keywords: principles of good governance, performance.

PENGESAHAN

NO. 500 /Abstract/LB/UMP/viii / 20 19 .

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang Gul

PRAKATA

Bismillahitohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil' alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas” dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, yaitu Ayahku John Mery dan Ibuku Nurbaiti yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendo'akan, dan memberikan motivasi kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku Ariadika Pristiawan dan Wenas Apriansyah, yang telah memberikan dorongan semangat dan do'a kepada perjuanganku.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si. dan Ibu Darmayanti, S.E., Ak.,M.M.,CA. yang telah membimbing, mengarahkan, mengarahkan, memberikan nasihat dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H. Fauzin Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu Staf Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu mengisi kuesioner.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang,..... Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	III
HALAMAN PEGESAHAN	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	V
HALAMAN PRAKATA	VI
HALAMAN DAFTAR ISI	VIII
HALAMAN DAFTAR TABEL	XI
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	XIII
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	XIV
ABSTRAK	XV
ABSTRACK	XVI
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. <i>Good Governance</i>	9
a. Pengertian <i>Good Governance</i>	9
b. Tujuan <i>Good Governance</i>	10
c. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	11
2. Kinerja berdasarkan <i>Value For Money</i>	13
a. Pengertian Kinerja	13
b. Manfaat Pengukuran Kinerja	14
c. Indikator Pengukuran Kinerja	15

d. <i>Value For Money</i>	17
3. Hubungan Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja	21
B. Penelitian Sebelumnya	22
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Hipotesis.....	27
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasionalisasi Variabel.....	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Data yang Diperlukan	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Profil Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.....	40
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.....	40
3. Struktur Organisasi	41
4. Data Anggaran dan Realisasi Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.....	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Jumlah Kuesioner	57
2. Gambaran Karakteristik Variabel	58
3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	60
4. Pengujian Data	79

a. Analisis Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	79
b. Analisis Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	86
BAB V. HASIL SIMPULAN DAN SARAN	89
A. Simpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Hasil Penelitian Awal Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Di Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas	4
Tabel I.2 Hasil Kinerja Pemerintah Daerah Di Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas	6
Tabel II.1 Kriteria Ekonomi	18
Tabel II.2 Kriteria Efisiensi	19
Tabel II.3 Kriteria Efektivitas	20
Tabel II.4 Penelitian Sebelumnya	26
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	29
Tabel III.2 Jumlah Pegawai/Karyawan	31
Tabel IV.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan	55
Tabel IV.2 Anggaran dan Realisasi Belanja	55
Tabel IV.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal	56
Tabel IV.4 Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
Tabel IV.5 Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Kuesioner	59
Tabel IV.6 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Partisipasi	60
Tabel IV.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Transparansi	62
Tabel IV.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Daya Tanggap ...	65
Tabel IV.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Orientasi Pada Kepentingan Publik	67
Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Berkeadilan	69
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Akuntabilitas	71
Tabel IV.12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Ekonomis	73
Tabel IV.13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Efisiensi	75
Tabel IV.14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Efektivitas	77
Tabel IV.15 Output Result for Outer Loading.....	80

Tabel IV.16	Output Cross Loading	82
Tabel IV.17	Nilai AVE	84
Tabel IV.18	Hasil Uji Realibilitas	85
Tabel IV.19	Hasil R-Square	86
Tabel IV.20	Uji Hipotesis	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	54
Gambar IV.2 Outer Loading Setelah Modifikasi	82

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Kuesioner
- Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden Data Ordinal
- Lampiran 3 Hasil Jawaban Responden Dara Interval
- Lampiran 4 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas
- Lampiran 6 Tabel Statistik
- Lampiran 7 Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 8 Lembar Perbaikan Persetujuan Skripsi
- Lampiran 9 Fotocopy Plagiat
- Lampiran 10 Fotocopy Surat Selesai Riset
- Lampiran 11 Fotocopy Sertifikat AIK
- Lampiran 12 Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 13 Jadwal Penelitian
- Lampiran 14 Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini perkembangan akuntansi dalam bidang keuangan di Indonesia semakin berkembang. Pengelolaan keuangan sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi di daerah untuk mengatur segala sesuatunya agar aktivitas pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara jujur, transparan, adil, efektif, serta efisien. Dalam bidang keuangan perubahan yang signifikan adalah perubahan yang terdapat pada bidang akuntansi pemerintahan yang akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah yang ada di Indonesia membuat pemerintah pusat menjadi sulit untuk mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berbasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang pemerintah daerah.

Sistem desentralisasi memberikan keleluasan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan wahana bagi daerah untuk dapat lebih mendekatkan berbagai kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil yang langsung menyentuh terhadap pelayanan masyarakat (*public service*). Pembangunan sektor publik dalam meningkatkan pelayanan publik adalah dengan cara mewujudkan/menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mardiasmo (2018: 22), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengendepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-prinsip *good governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan

organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat.

Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perancangan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* yang digunakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten dan pemerintah daerah yang otonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Guna meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berusaha untuk meningkatkan kinerja setiap unit-unit organisasi sektor publik yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas membentuk suatu Badan/Dinas/Kantor yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas. Sebelum terbentuknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Rawas.

Pembentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas bertujuan agar terciptanya pengelolaan pendapatan daerah yang terukur, transparan, dan profesionalisme menuju Mura Sempurna 2021 dan meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima guna meningkatnya kinerja pemerintah dan kesejahteraan rakyat dengan cara menggali dan menetapkan sumber-sumber pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan dengan wawancara terhadap karyawan di Badan Pengelola Pajak dan Daerah Kabupaten Musi Rawas ditemukan hasil sebagai berikut.

Tabel I.1
Hasil Penelitian Awal Tentang Prinsip-Prinsip *GoodGovernance* Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas

No	Keterangan	Hasil/Temuan
1	Partisipasi	Kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan.
2	Transparansi	Kurangnya kebebasan dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kebijakan dan pelayanan publik secara langsung.
3	Daya Tanggap	Prosedur dalam pelayanan masyarakat masih terjangkau lama dan cukup panjang.
4	Berorientasi pada Kepentingan Publik	Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja (mengutamakan pencapaian hasil (<i>outcome</i>) dari alokasi biaya (<i>output</i>) yang telah ditetapkan).

Lanjutan Tabel I.1

5	Berkeadilan	Kurangnya kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang anggaran dan kebijakan yang akurat dan memadai.
6	Akuntabilitas	Masih banyak anggaran yang belum dapat dipergunakan secara ekonomis.

Sumber : Karyawan BPPRD, 2019.

Berdasarkan hasil temuan pada tabel I.1 terlihat bahwa masih ada beberapa prinsip-prinsip *good governance* yang belum diterapkan dengan baik oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan berkeadilan yang tidak diterapkan oleh BPPRD berkemungkinan dapat menyebabkan kinerjanya tidak berjalan dengan baik karena informasi yang diberikan terbatas dan kurang memadai serta kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Serta daya tanggap yang tergolong cukup lama dan prinsip orientasi pada kepentingan publik yang kurang diterapkan mengakibatkan kinerja BPPRD berkemungkinan menjadi tidak efektif dan ekonomis karena *output* yang dihasilkan tidak maksimal dan penggunaan sumber daya tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Dan penerapan prinsip akuntabilitas yang belum optimal berkemungkinan menyebabkan terjadinya pemborosan yang tidak ekonomis di BPPRD Kab. Musi Rawas. Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yang masih belum sepenuhnya diterapkan di BPPRD Kab. Musi Rawas dapat menyebabkan kinerjanya menjadi kurang baik.

Tabel I.2
Hasil Kinerja Pemerintah Daerah
Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Rawas

Tahun	Ekonomis	Efisiensi	Efektivitas
2016	97,24%	114,84%	76,55%
2017	81,36%	79,88%	85,33%
2018	90,68%	69,73%	70,65%

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Rawas (Data diolah) 2019.

Berdasarkan tabel I.2 terlihat bahwa kondisi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas telah mampu bertindak efisien tetapi belum mampu bertindak efektif dan ekonomis. Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan efisien karena dalam melaksanakan kegiatannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mampu menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya dalam mencapai *output*. Namun kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan kurang ekonomis karena belum mampu meminimalisir belanja yang dikeluarkan sehingga sering kali terjadi pemborosan. Selain itu kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga belum dapat dikatakan efektif karena sebagian besar target, program, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum terlaksana dan tercapai. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan secara optimal sehingga menyebabkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi kurang baik.

Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah *good governance*. *Good governance* secara umum diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kemal Supriadi, dkk (2013) menyatakan bahwa *good governace* tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Adi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian suatu pelaksanaan suatu kegiatan atau program berdasarkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang mengambil judul penelitian yaitu, **Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengukur pengaruh prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang teori akuntansi tentang pengaruh implementasi prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat bagi lokasi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan *good governance* sehingga kinerja pemerintah daerah di waktu yang akan datang lebih baik.

3. Manfaat bagi almamater

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, tentunya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidarin Rosidi dan Aggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Government*. Yogyakarta: ANDI
- Adi Setiadi, dkk. 2015. Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Organisasi Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/6526>, diakses 4 Mei 2019.
- Aty Uar. 2016. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>, diakses 4 Mei 2019.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Kemal Supriandi, dkk. 2013. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/313894727>, diakses 4 Mei 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mahsun. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nur dan Ira. 2014. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jurnal Akuntansi Jember. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409>, diakses 4 Mei 2019.
- Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Program Strata Satu. 2018. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sondil E. Nubatonis, dkk. 2014. Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. <http://www.neliti.com/publications/42378/>, diakses 5 Mei 2019.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sujarweni V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Uttari dan Yenni. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/27160>, diakses 5 Mei 2019.